BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH DAN/ATAU QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pemberlakuan beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun yang didasarkan dan/atau pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sudah tidak sejalan lagi dengan terjadi perubahan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa perubahan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah telah ditentukan secara tegas sebatas mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten /kota dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH DAN/ATAU QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pelelangan Pekerjaan;
2. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Pertunjukan dan keramaian Umum;
3. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pajak Reklame;
4. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 1996 tentang Retribusi Undang-Undang Gangguan;
6. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 31 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Bermotor;
7. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 1996 tentang Retribusi dan Harga Penggantian Kenderaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1997);
8. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 33 Tahun 1996 tentang Retribusi Hotel Bunga Melati;
9. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 40 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1997);
10. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 41 Tahun 1996 tentang Retribusi Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
11. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 42 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Rumah Makan;
12. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 1997 tentang Retribusi Usaha Objek Wisata dan Tarif Biaya Masuk Objek Wisata;
13. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Usaha Penangkar Bibit Budidaya Perkebunan (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Utara Tahun 1997);
14. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 1997 tentang Retribusi Penyaluran Bibit Budidaya Perkebunan (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1997);
15. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 1997 tentang Retribusi Hasil Produksi Komoditi Perkebunan (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1997);

16. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Wajib Latih tenaga Kerja (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1997);
17. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1997);
18. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Usaha Penangkar Bibit Budidaya Perkebunan (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1997);
19. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
20. Peraturan Daerah TK.II Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Minum Permukaan.
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 123);
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 124);
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 132);
24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal lebih Kecil dari GT-7 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 133);
25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penataan Pembinaan Pergudangan/Ruangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 136);

Dicabut dan nyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH (6 TAHUN 2015)